

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan**



Disusun oleh :

**SRI INDAH YANI
NIM : 201410240211003**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Pebruari 2019**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU**

Diajukan oleh :

**SRI INDAH YANI
201410240211003**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal: **Jumat, 18 Januari 2019**

Pembimbing Utama


Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping


Dr. Agus Tinus

Direktur
Program Pascasarjana


Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan
Pengembangan Pendidikan


Dr. Agus Tinus

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SRI INDAH YANI
201410240211003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat / 18 Januari 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Akhsanul In'am, Ph.D
Sekretaris	:	Dr. Agus Tinus
Penguji I	:	Dr. Lud Waluyo
Penguji II	:	Dr. Estu Widodo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **SRI INDAH YANI**

NIM : **201410240240211003**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul: **PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU**. Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2019

Yang menyatakan,


SRI INDAH YANI

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Program Studi Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, mengarahkan, serta memberikan motivasi untuk terselesaikannya tesis ini;
3. Dr. Agus Tinus, selaku ketua program studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, mengarahkan, serta memberikan motivasi untuk terselesaikannya tesis ini;
4. Bapak Ibu Dosen Magister Kebijakan dan pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penyusunan tesis ini;
5. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan sharing tentang pendidikan Inklusif dengan penulis;
6. Rekan-rekan satu angkatan terimakasih atas masukan dan diskusi ilmiah bermanfaatnya dalam perkuliahan maupun suasana persahabatan dan kekeluargaan yang luarbiasa;
7. Orang tua, suami, dan keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini;

8. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya tesis ini;

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pemangku kebijakan pendidikan, para pemerhati pendidikan dan khususnya bagi penulis sendiri.

Malang, 01 Desember 2018

Penulis



ABSTRAK

Indahyani, Sri. (2018). *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Akhsanul In'am, Ph.D; (2) Dr. Agus Tinus.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusif serta kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan pada tiga Sekolah Dasar bidikan Dinas Pendidikan di kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data dengan reduksi data dan penarikan kesimpulan melalui kata-kata. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah dasar di kecamatan Junrejo kurang optimal. Hal ini disebabkan karena sekolah belum dapat memenuhi beberapa indikator pengukuran keberhasilan penyelenggara pendidikan inklusif. Sikap guru pada sekolah bidikan Dinas Pendidikan cukup positif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif tetapi kesiapan berdasarkan beberapa indikator pengukuran juga belum optimal. Kendala berkaitan dengan ketenagaan adalah belum adanya tambahan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan kurangnya peningkatan kompetensi guru umum menjadi guru pembimbing khusus. Selain itu kurangnya dukungan, pengawasan, dan evaluasi dari Dinas Pendidikan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di sekolah-sekolah bidikan penyelenggara pendidikan inklusif menjadi bias tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pendidikan, Inklusif, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Indahyani, Sri. (2018). *Implementation of Inclusive Education in Primary School at Junrejo Batu City, Master of Policy and Education Development, University of Muhammadiyah Malang, Adviser: (1) Ahsanul In'am, Ph.D; (2) Dr. Agus Tinus.*

The purpose this research was to investigate the implementation of inclusive education. The research was conducted at three Primary Schools in Junrejo Batu City. This method is the qualitative descriptive. Collection data used by observation, interview and document techniques. Analyzing data by reducing data and drawing conclusions through words. Testing the validity of the data used triangulation. The results showed that the implementation of inclusive education at primary schools in Junrejo district of Batu City was lesser than optimal. This is because schools have not been meeting several indicators to measuring the success of inclusive education providers. The attitudes of teachers in the Education Office shooting schools are quite positive towards the implementation of inclusive education but readiness based on several measurement indicators was also not optimal. Constraints related to workforce are the absence of additional Adviser Special of Teachers (GPK) and the lack of increasing competence for general teachers to be special counselors. In addition, the lack of supporting, supervision and evaluation from the Education Office has resulted in the implementation of policies by schools providing inclusive education target to be biased not in accordance with established policies.

Keyword: Implementation Education, Inclusive, Elementary School.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
1. Pendahuluan	1
2. Kajian Teori.....	4
2.1 Kebijakan Publik	4
2.2 Konsep Pendidikan Inklusif	5
2.3 Definisi Pendidikan Inklusif	7
2.4 Tujuan Pendidikan Inklusif	8
2.5 Kurikulum Pendidikan Inklusif.....	9
2.6 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.....	11
2.7 Tenaga Kependidikan Pendidikan Inklusif	12
2.8 Sarana Prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Inklusif.....	13
2.9 Landasan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif	14
2.9.1 Landasan Sosiologis.....	14
2.9.2 Landasan Psikologis.....	14
2.9.3 Landasan Religius	15
2.9.4 Landasan yuridis	15
2.9.5 Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah Dasar	16

3. Metode Penelitian	18
3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian	18
3.2 Lokasi Penelitian	18
3.3 Subyek Penelitian	18
3.4 Sumber dan Jenis Penelitian	18
3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
3.6 Teknik Analisa Data	19
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data	19
4. Hasil Penelitian	20
4.1 Kesiapan sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kecamatan Junrejo	20
4.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar	23
5. Pembahasan	25
5.1 Kesiapan sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kecamatan Junrejo	25
5.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar	30
6. Simpulan	32
7. Rujukan	33

1. Pendahuluan

Pendidikan inklusif diperkenalkan secara internasional dalam konferensi dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca Spanyol. Pendidikan inklusif telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak dengan fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan, dimana semua peserta didik dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya (Tarmansyah, 2009; Elisa & Wrastari, 2013; Fitria, 2012; Mahabbati, 2012).

Indonesia menuju pendidikan Inklusif telah dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 dalam Lokakarya Nasional tanggal 8-14 Agustus 2004 di Bandung yang menghasilkan Deklarasi Bandung. Keberadaan anak-anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia akan mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Mendapat hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), diperjelas oleh Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Dokumendokumen ini memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. (Stubbs, 2002)

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Negara-negara termasuk Indonesia belum melaksanakan sepenuhnya pendidikan inklusif dengan berbagai faktor salah satunya adalah masih kurangnya pendidik dan guru yang berkompeten dalam pendidikan inklusif padahal guru adalah titik pusat dari keberhasilan pendidikan inklusif. Selain itu masih kurangnya minat para guru reguler untuk menerima pendidikan inklusif karena selama ini masih dikonsentrasikan pada keunggulan dibanding keadilan (Al-Zyouidi, 2006; Tarmansyah, 2009).

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler adalah proses yang panjang dan agar proses ini menjadi sukses orang tua, guru, peserta didik, dan tokoh masyarakat harus terlibat dalam perencanaan. Guru merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek inklusif di sekolah, karena guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus (Johnsen, 2003; Elisa, 2013). Seorang guru diharapkan dapat memberikan kehidupan kelas agar menjadi lebih hangat dan pada waktu yang bersamaan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang lain untuk dapat saling berinteraksi. Guru kelas inklusif harus siap untuk beradaptasi dengan peserta didik, hasil belajar, peralatan dan alat peraga, serta metode yang digunakan didasarkan pada filosofi bahwa perbedaan adalah positif (Johnsen, 2013).

Penelitian ini dilakukan sejalan dengan penelitian dari Marti (2012) yang berjudul Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar Kota Padang sudah dapat berjalan baik tetapi belum maksimal. Administrasi sekolah dan kondisi lingkungan sekitar sekolah sudah mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif namun dari segi kompetensi guru dan dukungan masyarakat belum berjalan maksimal. Penelitian sejenis yaitu penelitian dari Prastiyono (2013) dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di sekolah Galuh Handayani Surabaya). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di sekolah Galuh Handayani belum sepenuhnya optimal sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan PP No. 32 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak ada perubahan pada pasal 41 (1)

yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi setiap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan peraturan ini sejauh mana keseriusan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Beberapa permasalahan muncul misalnya minimnya sarana penunjang pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki guru sekolah inklusif, dan kurikulum pendidikan umum yang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan kasus-kasus yang muncul terkesan program pendidikan inklusif hanya program eksperimental.

Pergub Nomor 6 Tahun 2011 yang dipertegas dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Kota Batu mendeklarasikan diri sebagai kota peduli inklusif pada bulan Oktober tahun 2014. Pemerintah Kota Batu akan menambah 11 sekolah dasar negeri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus di tiga wilayah kecamatan di Kota Batu yaitu Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Sebelumnya ada tujuh sekolah inklusif, jadi total sekolah inklusif di Kota Batu yang direncanakan adalah 18 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selain menambah sekolah inklusif, Disdikpora sedang menyiapkan tenaga guru yang idealnya adalah guru khusus yang benar-benar Guru Berpendidikan Khusus (GPK) dan menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Batu.

Bertambahnya sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bertujuan agar pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tidak terpusat pada satu lembaga tetapi dapat dilakukan di sekolah-sekolah yang terjangkau karena dekat dengan tempat tinggal siswa. Paneliti memfokuskan penelitian pada sekolah dasar yang menjadi bidikan Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi di kecamatan Junrejo yaitu SDN Pendem 01, SDN Dadaprejo 01, dan SDN Beji 01. Kesiapan sekolah secara keseluruhan sebagai sekolah bidikan pelaksanaan inklusif harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan: 1). bagaimana kesiapan sekolah bidikan dinas pendidikan dalam pelaksanaan

pendidikan inklusif di Sekolah Dasar kecamatan Junrejo?; 2) apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar kecamatan Junrejo Kota Batu?

2. Kajian Teori

2.1 Kebijakan Publik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat lepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, pendidikan nasional dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Menurut Dye kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu (Rohman, 2013; Anshori, 2012).

Nugroho (2008), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praktis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku, walaupun model-model tersebut

mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak. Pendidikan merupakan barang publik karena bersifat non-eksklusif dan non-rivalry yakni tiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Oleh karena itu pendidikan tidak boleh diserahkan ke pasar untuk diproduksi karena akan menyebabkan biaya pendidikan atau harga pendidikan menjadi mahal sehingga kesempatan dan akses memperoleh pendidikan menjadi terbatas (Dunn, 2003; Bakry,2010)

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berdampak terhadap kepentingan publik dan dapat diterima publik atau tidak. Pada tahapan perencanaan kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tidak jelas hasil yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Akhirnya dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara rencana dan pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.2 Konsep PendidikanInklusif

Konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi gerakan „Pendidikan untuk Semua“ dan „Peningkatan mutu sekolah“. Pendidikan inklusif merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi (Stubbs:2002)

Konsep-konsep Utama yang terkait dengan Pendidikan Inklusif:

a) Konsep-konsep tentang anak

Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam komunitasnya sendiri. Semua anak dapat belajar, dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar. Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar. Pengajaran yang terfokus pada anak bermanfaat bagi semua anak.

b) Konsep-konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan.

Pendidikan lebih luas dari pada persekolahan formal. Sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif. Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan

dan ramah. Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif. Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antarmitra.

c) Konsep-konsep tentang keberagaman dan diskriminasi.

Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi. Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.

d) Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi.

Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi. Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang. Kolaborasi, kemitraan, metodologi partisipatori, Penelitian tindakan, penelitian kolaboratif

e) Konsep-konsep tentang sumber daya

Membuka jalan ke sumber daya setempat. Redistribusi sumber daya yang ada. Memandang orang (anak, orangtua, guru, anggota kelompok termarginalisasi dll) sebagai sumber daya utama. Sumber daya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pada tingkat lokal dibutuhkan untuk berbagai anak, misalnya Braille, alat asistif.

Banyak literatur menjelaskan tentang konsep inklusi sosial di sekolah khusus mengacu pada murid dengan “*Special Education Needs*” (SEN) (Mithel 2005, O’Hanlon, 2003). Masing-masing definisi berbeda antara negara satu dengan negara lain, termasuk anak-anak dengan kekurangan fisik ringan hingga kelainan intelektual yang parah. Cacat seperti ini sering diterjemahkan sebagai kelainan cara belajar anak-anak dan pemrosesan informasi. Lain lagi dengan anak-anak yang cacat fisik dan kelainan sensorik serta bermasalah dengan emosional dan/atau kognitif dikategorikan pada “SEN”. Mereka adalah anak-anak yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Pendidikan Inklusif adalah salah satu yang sangat responsif terhadap keanekaragaman kebutuhan murid yang berbeda, dengan prinsip sekolah beradaptasi dengan murid bukan sebaliknya (Madan, 2007).

Pendidikan inklusif sangat erat hubungannya dengan pendidikan untuk semua dimana harus diakui bahwa anak-anak berbeda dalam banyak dimensi seperti latar belakang etnis, status sosial-ekonomi keluarga, agama, dan lain-lain.

Oleh karena itu pendidikan inklusif berusaha untuk mengatasi hambatan belajar secara umum tanpa membedakan peserta didik agar tujuan pendidikan untuk semua dapat tercapai. Anak-anak akan merasa aman dan nyaman belajar walaupun mereka mempunyai kelainan yang berbeda-beda. Pendidikan inklusif menyiapkan anak untuk hidup bermasyarakat yang menghargai perbedaan.

2.3 Definisi Pendidikan Inklusif

Kebingungan orang tentang pendidikan inklusif diakibatkan oleh penggunaan bermacam-macam istilah seperti inklusi, integrasi, mainstreaming, pendidikan luar biasa dan pendekatan unit kecil secara bertukar-tukar tanpa kejelasan atau definisi yang pasti. Praktek mengadakan pendidikan inklusif di sekolah umum sering kali disebut inklusi, dan justru hal ini dapat mengakibatkan eksklusi lagi. Ini sebuah contoh yang tidak tepat, yang sering membawa hasil yang sangat tidak diharapkan (Stubbs, 2002)

Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusif, diantaranya adalah pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan (Lambe & Bones, 2006; Dukmak, 2013).

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya (Yusraini, 2013). Menurut UNESCO (2001), "Pendidikan Inklusif telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktek eksklusi" "Inklusi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan."

Inklusif merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler. Dewasa ini terminologi inklusif digunakan untuk mengagah hak anak-anak yang memiliki ketidakmampuan tertentu untuk dididik dalam sebuah lingkungan pendidikan (sekolah) yang tidak terpisah dari anak-anak lain yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu (Olsen & Fuller, 2003).

Stubbs (2002) menjelaskan, pendidikan Inklusif menurut Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan Pendidikan Inklusif: 1) lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal; 2) mengakui bahwa semua anak dapat belajar; 3) memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. 4) mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dll; 5) merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya; 6) merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Menurut Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta lain pada umumnya (Pergub Jatim Nomor. 6 Tahun 2011, Perwali Kota Batu Nomor 24 Tahun 2014)

Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di sekolah umum bukan hanya menyangkut metode dan sistem pendidikan, tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan dan tidak mendiskriminasi. Memberikan layanan khusus terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sekaligus membelajarkan kepada peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima perbedaan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

2.4 Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia, di samping merupakan pendidikan yang baik dan dapat menumbuhkan rasa sosial. Itulah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan pentingnya pendidikan inklusif. Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusif merupakan hak asasi manusia: (1) semua anak memiliki hak untuk belajar bersama; (2) anak-anak seharusnya dihargai dan tidak didiskriminasi dengan cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas

sekolah khusus, menghendaki akhir dari segregasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; (4) tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain (CSIE, 2005; Stubb, 2003).

Menurut Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 2, yang tercantum pula dalam Pergub Nomor 6 tahun 2011, dan Perwali Nomor 24 tahun 2014 tahun pendidikan Inklusif di Indonesia bertujuan: 1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Melalui pendidikan inklusif anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan sama dengan peserta didik lain di kelas reguler. Anak-anak seharusnya dihargai dan mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan dalam segala hal. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing baik anak-anak normal maupun berkebutuhan khusus dimana mereka tidak tahu bagaimana memposisikan diri. Oleh karena itu orang tua dan guru adalah penunjuk pertama dan utama yang dapat mengarahkan mereka harus berada dimana. Melalui pendidikan anak-anak akan dapat mengembangkan bakat dan potensinya, terutama anak-anak berkebutuhankhusus.

2.5 Kurikulum Pendidikan Inklusif

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun karena banyak hambatan yang dialami peserta didik berkelainan sangat bervariasi, mulai dari yang bersifat ringan, sedang hingga berat, maka dalam pelaksanaannya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu dimodifikasi (penyelarasan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik). Penyelarasan dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum di sekolah yang terdiri dari: kepala sekolah, gurukelas,

guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli yang terkait (Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, 2013).

Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE, 2005) memberikan gambaran tentang implementasi kurikulum pada sekolah inklusif. Ada tiga tahap dalam masa transisi yang dialami dalam dunia pendidikan menuju pendidikan yang inklusi. *Pertama adalah segregasi*, dalam tahap segregasi ini sangat jelas terlihat tereklusinya sebuah pendidikan, dimana kurikulum dan sistem pendidikan masih terpisah antara sekolah regular dan sekolah luar biasa, belum adanya partisipasi dari semua pihak. Dalam tahap ini anak yang berkebutuhan khusus masih sulit untuk memperoleh pendidikan, karena terbatasnya akses untuk mereka, sementara tanggung jawabnya masih pada penyelenggara pendidikan masing-masing.

Kedua adalah integrasi, dalam tahap ini kurikulum dan sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masih merupakan bagian dari sekolah regular, belum adanya partisipasi penuh dan guru biasa belum terbiasa beradaptasi dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dan tanggungjawabnya masih tergantung pada relasi dan kepedulian masing-masing guru.

Tahap yang *ketiga* adalah Inklusi, tahap inilah yang akan membawa perubahan-perubahan dalam kesadaran dan sikap, keadaan, metodologi, penggunaan konsep-konsep terkait dan sebagainya. Dalam tahap ini kurikulum sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan anak dan system pendidikannya ada di sekolah umum, dimana pelaksanaan pendidikan, pengelolaan kelas dapat menjamin peningkatan pendidikan dan akses untuk semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam tahap ini juga Sebagian besar anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum dengan akses dan lingkungan yang kondusif.

Menurut Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal 7 bahwa Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya. Pergub Nomor 6 tahun 2011 pasal 9, Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.

Sesuai dengan undang-undang maka pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusif di Indonesia harus mengikuti standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Menggunakan kurikulum sekolah dan dikembangkan serta diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum pendidikan inklusif harus dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami peserta didik semaksimal mungkin. Selain itu diharapkan juga dapat membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkelainan baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.

2.6 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa (2009), Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi: 1) anak dengan gangguan penglihatan/tunanetra (kurang awas/ *low vision* dan tunanetra total/ *totally blind*); 2) anak dengan gangguan pendengaran dan bicara/ tunarungu/ wicara (anak kurang dengar/ *hard of hearing* dan tuli/*deaf*); 3) anak dengan kelainan kecerdasan (gangguan kecerdasan/ intelektual dibawah rata-rata: tunagrahita ringan IQ 50-70, tunagrahita sedang IQ 25-49, tunagrahita berat IQ 25 kebawah) dan anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata (*gifted* dan genius yaitu anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan *talented* yaitu anak yang memiliki bakat khusus); 4) anak dengan gangguan anggota gerak/ tunadaksa (anak layu anggota gerak tubuh/ polio dan anak dengan gangguan fungsi syaraf otak/ *celebral palcy*); 5) anak dengan gangguan perilaku dan emosi/ tunalaras (anak dengan gangguan perilaku ringan, sedang, dan berat dan anak dengan gangguan emosi dengan taraf ringan, sedaang, dan berat); 6) anak dengan gangguan belajar spesifik (kesulitan membaca/ *disleksia*, kesulitan menulis/ *disgrafia*, dan kesulitan berhitung/ *diskakulia*); 7) anak lamban belajar (*slow leaner*); 8) anak autisme; 9) anak dengan gangguan pemusatan perhatian/ *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD); 10) anak korban kekerasan dan narkoba.

2.7 Tenaga Pendidik PendidikanInklusif

Dalam menangani anak berkelainan diperlukan keahlian tersendiri karena tidak semua aktivitas di sekolah dapat diikuti oleh anak cacat, missal anak cacat netra tak mampu mengikuti pelajaran menggambar atau olah raga begitu pula anak tuna rungu sulit mengikuti pelajaran seni suara dan cacat yang lain perlu penanganan khusus karena keterbatasannya. Maka sangat diperlukan guru pembimbing khusus yang mampu memahami sekaligus menangani keberadaan anak cacat termasuk di dalamnya memahami karakter dari masing-masing jenis kecacatannya (Alfian, 2013)

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2013) menjelaskan bahwa tenaga pendidik pendidikan inklusif adalah TenagaPendidik profsional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Kedudukan untuk masing guru secara rinci meliputi: 1) guru kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sekolah; 2) guru mata pelajaran/bidang studi tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah; dan 3) guru Pembimbing Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan.

Tugas dan tanggung jawab guru pembimbing khusus dijelaskan dalam Pergub nomor 6 tahun 2011, meliputi: 1) merancang dan melaksanakan program kekhususan; 2) melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual; 3) memodifikasi bahan ajar; 4) melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan 5) membuat laporan program pengembangan anak berkebutuhan khusus

2.8 Sarana Prasarana dan Pembiayaan PendidikanInklusif

Menurut Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Depdiknas (2009) dalam menentukan kebutuhan sarana prasarana perlu memperhatikan mekanisme sebagai berikut: 1) penempatan layanan dirujuk ke sekolah penyelenggara inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya; 2) pengadaan sarana prasana yang diberikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah hanya bersifat prioritas utama (sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mudah dioperasikan/tidak membutuhkan tenaga operasional khusus, relatif mudah diadakan/murah dan dapat dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan anak berkebutuhan khusus.; 3) penentuan jumlah sarana prasarana didasarkan pada rasio pengguna dengan sarana yang diadakan (prinsip pada faktor guna tinggi); 4) semua sarana prasana pendidikan yang ada pada SD reguler dapat dimanfaatkan anak berkebutuhan khusus, hanya memerlukan sedikit modifikasi dalam penggunaannya; 5) guru sekolah biasa yang menangani anak berkebutuhan khusus hanya guru yang telah dibekali pengetahuan dan kemampuan mengenai anak berkebutuhan khusus termasuk dalam pengadaan dan penggunaan sarana prasarana; 6) cara pengadaan dan penggunaan sarana prasarana dapat melihat pada SDLB terdekat atau memanggil guru SDLB untuk datang memberi contoh mengenai penggunaan alat yang terdapat di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan 7) jumlah guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak perlu ditambah tetapi disediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan *centre* atau guru sekolah reguler yang dididik dan dilatih untuk menjadi seorang guru yang memahami ilmu Pendidikan LuarBiasa.

Sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak berbeda dengan sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah

reguler pada umumnya, yaitu: 1) ruang kelas beserta kelengkapannya; 2) ruang praktikum (laboratorim); 3) ruang perpustakaan; 4) ruang serbaguna beserta kelengkapannya; 5) ruang BP/BK; 6) ruang UKS; 7) ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha; 8) lapangan olahraga; 9) toilet; 10) ruang ibadah; 11) ruang kantin; dan 12) ruang sumber (tempat alat bantu belajar anak berkebutuhan khusus).

Sarana prasana khusus disesuaikan dengan setiap jenis kelainan berdasarkan skala prioritas artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik. Misalnya anak tunanetra alat yang dibutuhkan antara lain alat assesmen pengelihatan, alat orientasi dan obilitas, alat bantu pelajaran akademik, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat latihan fisik.

2.9 Landasan Pelaksanaan PendidikanInklusif

2.9.1 LandasanSosiologis

Menurut Astuti (2011), setiap anak baik yang memiliki kecerdasan istimewa, normal maupun yang berkelainan/ memiliki hambatan dan anak berkebutuhan khusus lainnya seharusnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya sehingga secara sosial keberadaan mereka diakui.

Menurut perspektif sosiologis, suatu masyarakat (sekolah) sebenarnya adalah merupakan sistem adaptif, karena masyarakat (sekolah) merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan, disamping itu sekolah juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak setinggi tingginya.

2.9.2 LandasanPsikologis

Menurut Hawadi dalam Astuti (2011), dalam perspektif psikologis sejak ditetapkannya sisdiknas, bibit-bibit unggul (anak cerdas istimewa) di Indonesia belum secara maksimal diberi peluang untuk berkembang. Masa depan anak-anak tersebut kurang cerah dengan diberikannya pendidikan yang membosankan dan kurang mereka butuhkan. Kebanyakan pendidik banyak yang ingkar untuk menerapkan prinsip demokratisasi pendidikan bagi anak didik dan memahami hakekat pendidikan sesungguhnya.

Melalui pendidikan inklusif, strategi pembelajaran akan disesuaikan dengan hambatan yang dimiliki anak sehingga anak dapat mengembangkan kemampuannya. Penerapan teori psikologis pendidikan dalam bidang pendidikan inklusif salah satunya pemahaman yang luas tentang pembelajaran dan perilaku anak dalam proses belajar mengajar di sekolah, perkembangan anak, dan kebutuhan psikologis anak.

2.9.3 LandasanReligius

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak dapat lepas dari agama karena setiap warga negara mempunyai hak beragama. Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah tuntutan dalam setiap langkah perbuatan dan amalan. Allah menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan (QS. Al-Hujurat 49:13). Anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus pada hakikatnya adalah manifestasi dari hakikat manusia sebagai individual yang berbeda. Interaksi antar manusia harus dikaitkan dengan upaya perbuatan kebajikan.

Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 menyatakan: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berdasarkan ayat ini siapapun manusia selalu berkeinginan agar bentuk tubuhnya sempurna tanpa cacat baik fisik maupun mental. Dari ayat ini Allah memberikan pelajaran agar umat manusia selalu saling menyayangi siapapun baik yang sempurna maupun tidak sempurna secara fisik dan mental karena apapun yang diberikan Allah pasti ada maksud dan tujuannya.

2.9.4 LandasanYuridis

Payung hukum dan dokumen pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU Sidiknas No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1-2, menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat 2 menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikankhusus.

Dasar hukum lainnya adalah UU No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 41 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran peserta didik dengan kebutuhan khusus. Permendikbud No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan Deklarasi Indonesia menuju Pendidikan Inklusif tahun 2004 yang disebut Deklarasi Bandung berkomitmen untuk merangkul perbedaan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah diperkuat dengan Pergub dan Perbup/ Perwali untuk menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Batu berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No. 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif provinsi Jawa Timur dan Perwali Kota Batu No. 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

2.9.5 Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Konsep sekolah dan pendidikan bukan hanya terfokus pada sekolah formal, namun institusi-institusi non formal lainnya; sebuah institusi pendidikan atau sekolah merupakan institusi yang ramah dan responsif terhadap perubahan; selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, kemampuan guru dan yang paling mendasar adalah merubah pandangan sekolah tentang kebutuhan anak, melakukan kerjasama dengan institusi terkait sebagai rekan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan mewujudkan sebuah sekolah yang ramah terhadap anak sehingga anak merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebayanya (Alfian, 2013).

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2013) menjelaskan bahwa manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi manajemen: 1) kesiswaan; 2) kurikulum; 3) pembelajaran; 4) penilaian;

5) ketenagaan; 6) sarana-prasarana; 7) pembiayaan; dan 8) sumberdaya lingkungan.

Kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diberikan penghargaan. Penghargaan dimaksud untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Penghargaan dapat berupa simbol, sertifikat, piagam, dan dapat pula dalam bentuk lain, seperti promosi, dana pembinaan, pelatihan, maupun dalam bentuk lain yang relevan.

Kepada satuan pendidikan yang telah memperoleh surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan Propinsi, apabila dinilai lalai dalam melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Berat ringan sesuai dengan tingkat kelalaiannya. Jenis-jenis sanksi yang diberikan dapat berupa: teguran, peringatan tertulis, maupun dalam bentuk pembatalan surat ketetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Sistem Sekolah Ramah Anak (SRA) menekankan pada pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan gaya belajar setiap anak; mengajar anak bagaimana belajar kooperatif, aktif, dan demokratis. Isi materi yang terstruktur dengan sumber daya yang berkualitas baik dan melindungi anak dari pelecehan dan bahaya kekerasan. Dengan demikian pendidikan inklusif dapat meningkatkan kualitas sekolah, baik dari segi layanan, materi, dan peserta didik, karena dapat mengakomodasi kepentingan setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, 2013)

Konsekuensi dari penyelenggaraan program ini harus membutuhkan biaya yang mahal, sehingga idealnya pemerintah mengambil peran agar benar-benar pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk menopang suksesnya penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu kerjasama dengan semua pihak mengingat kemampuan Pemerintah untuk membantu masih sangat terbatas sementara anak cacat yang belum tertampung mengikuti pendidikan formal semakin banyak sehingga dapat menjadikan kendala suksesnya Wajar 9 Tahun.

3 Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian dengan kondisi obyek yang alamiah, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013; Mukhtar, 2013). Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan memperoleh gambaran di lapangan sebagaimana adanya tanpa melakukan perubahan terhadap sasaran penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tiga dari sebelas sekolah yang menjadi bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kecamatan Junrejo yaitu SDN Dadaprejo 01, SDN Pendem 01, dan SDN Beji 01. Ketiga Sekolah tersebut merupakan Sekolah Dasar Inti di wilayah kecamatan Junrejo.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar di kecamatan Junrejo yang dibidik oleh Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Data dipilih dari tiga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang berlokasi di kecamatan Junrejo Kota Batu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dua jenis data digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku subyek (informan) berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah subyek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, dan gambar dan foto yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah-sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif.

3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif tentang pelaksanaan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar di kecamatan Junrejo ini menggunakan instrument observasi, instrument wawancara, dan instrumen dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen (Sugiyono, 2013).

Observasi adalah suatu upaya pengamatan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktifitas organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya (Tarmansyah, 2009). Observasi dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung ke sekolah-sekolah yang dibidik dinas pendidikan Kota Batu sebagai pelaksanaan pendidikan inklusif. Wawancara dilakukan pada kepala sekolah dan guru untuk mengetahui kesiapan sekolah dan kesiapan guru setelah ditunjuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, kemudian dokumen hasil wawancara sebagai dokumen pendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan gambaran dengan kata-kata. Proses pelaksanaan teknik analisa data yang dilakukan dimulai dengan mencatat hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikutnya adalah memilah-milah data untuk menajamkan dan mengarahkan pada fokus penelitian. Data hasil penelitian ditafsirkan dan diperoleh maknanya. Dilanjutkan dengan mengklasifikasi data penelitian sesuai dengan fokus penelitian kemudian dikelompokkan yang termasuk dalam kesiapan sekolah dan kesiapan guru serta hambatan yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan inklusif. Menganalisa satu persatu data hasil penelitian dengan penjelasan secara kualitatif. Penyajian data setelah dilakukan analisa dan pengecekan ulang data disajikan

dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel. Terakhir adalah penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

3.7 Teknik Uji Keabsahan Data

Peneliti melakukan triangulasi terhadap penelitian ini dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat dan dosen pembimbing yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan penelitian dan ketelitian yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pelaksanaan penelitian. Triangulasi data dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2013; Moleong, 2007).

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data dengan meminta kesepakatan untuk mendapatkan data yang kredibel tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, maka observasi dilakukan pada sekolah-sekolah yang menjadi bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Wawancara dilakukan pada kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 24 Tahun 2013 merupakan sumber data dokumen sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Batu.

4 Hasil Penelitian

4.1 Kesiapan sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kepala sekolah di tiga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kecamatan Junrejo bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di tiga sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu kurang optimal. Hal ini disebabkan karena sejumlah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif belum terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi. Indikator tersebut antara lain: 1) indikator kelembagaan; 2) kurikulum dan pembelajaran; 3) ketenagaan; 4) kesiswaan; 5) sarana dan prasarana; dan 6) pembiayaan. Masing-

masing indikator ini dikembangkan untuk menggambarkan tingkat kinerja sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Indikator kelembagaan yang dimaksud adalah manajemen pelaksanaan pendidikan inklusif mulai dari koordinator pelaksana, legalitas program, program kerja hingga dokumen-dokumen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan maka sekolah kurang memahami isi kebijakan sehingga kepala sekolah dan guru belum mampu menjabarkan isi kebijakan tersebut. Dokumen-dokumen program jangka panjang, program tahunan, dan program peningkatan kompetensi guru belum terpenuhi. Pertemuan dengan wali murid dan stakeholder secara berkala belum dilaksanakan sehingga masih kurang sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada masyarakat.

Model kurikulum dan pembelajaran yang digunakan adalah model kurikulum akomodatif dimana guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan Perwali tahun 2013 bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Ketiga sekolah yang ditunjuk menggunakan dua kurikulum yaitu KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. Sekolah menyiapkan kurikulum sesuai kelas peserta didik serta minat dan bakatnya. Sesuai kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan wajib menyediakan paling sedikit dua orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Dinas Pendidikan wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus. Ketiga sekolah yang ditunjuk sudah menyiapkan masing-masing dua orang guru pembimbing khusus untuk diberikan peningkatan kompetensi sebagai guru pendidikan inklusif. Namun Dinas pendidikan belum menjalankan kebijakan tersebut dan belum memberikan tambahan guru pembimbing khusus kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Indikator kesiswaan adalah semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Walaupun tidak memiliki tenaga professional dalam bidang psikologi, tiga sekolah telah melakukan tes Psikologi kepada seluruh peserta didik baru dan peserta didik lama dengan mendatangkan tenaga professional bidang Psikologi. Peserta didik lama dengan prestasi belajar kurang dan berdasarkan pengamatan perilaku dianggap mempunyai kekhususan dimasukkan dalam kategori inklusif untuk mendapatkan bimbingan khusus.

Kesiapan Sarana prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan peserta didik normal. Namun sesuai peraturan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dan tidak merasa dibedakan maka peserta didik dimasukkan dalam kelas yang sama dengan peserta didik normal. Disarankan agar sekolah menyediakan ruang kelas khusus untuk penanganan khusus. Dua sekolah mempunyai ruang khusus namun satu sekolah belum memiliki ruang khusus.. Sarana prasana seperti papan tulis, bangku dan lain-lain sama dengan peserta didik normal lainnya. Tambahan sarana dan prasarana lain seperti alat peraga dan buku-buku menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik menyesuaikan dengan persediaan yang ada disekolah.

Kesiapan pembiayaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah negeri diperoleh dari dana BOS karena siswa berkebutuhan khusus tersebut masuk dalam akumulasi jumlah peserta didik dalam sekolah tersebut. Namun ada tambahan biaya sesuai Perwali nomor 24 tahun 2013 pasal 16 bahwa biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekolah penyelenggara mengatur operasioanal pembiayaan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Sekolah belum mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan yang berasal dari APBD tersebut karena baru akan menyelenggrakan pendidikan inklusif.

Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan membantu menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan wewenangnya. Dinas

Pendidikan wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dan angket kepada 15 orang guru di tiga sekolah bidikan dinas pendidikan di wilayah kecamatan Junrejo, 11 orang menyatakan sikap positif dan empat orang guru tidak siap terhadap kebijakan penyelenggara pendidikan inklusif. Empat orang yang tidak siap dengan alasan tidak mempunyai kompetensi untuk membimbing dan menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan kurang melakukan sosialisasi ke sekolah penyelenggara dan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Guru di sekolah penyelenggara melakukan tugas memberikan pembelajaran dan bimbingan, namun hasilnya tidak dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Kurangnya pemahaman terhadap isi kebijakan mengakibatkan guru tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Pemahaman terhadap isi kebijakan merupakan hal penting agar pelaksanaan program sesuai dengan isi dan arah kebijakan. Pada indikator ketenagaan yang dimaksud adalah berapa jumlah guru yang dilibatkan dalam pengelolaan program inklusif, berapa jumlah GPK yang ada di sekolah, apa statusnya, dan apakah program ini mempunyai tenaga ahli dalam bidang Psikologi untuk menangani kekhususan peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, semua sekolah penyelenggara melibatkan semua guru dalam program inklusif. Namun hanya satu dari masing-masing sekolah yang sudah mengikuti workshop pendidikan inklusif. Dari tiga sekolah hanya satu yang mempunyai GPK dengan status pegawai Honorer daerah sedangkan dua sekolah belum menerima dari pemerintah daerah. Tiga sekolah bidikan tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang psikologi, namun bekerja sama dengan lembaga profesional dalam bidang psikologi untuk melakukan identifikasi terhadap peserta didik.

4.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di tahun pertama belum maksimal dilaksanakan dengan berbagai alasan. Sejak pencaangan belum ada gerakan yang berarti terutama sekolah-sekolah bidikan Dinas Pendidikan di kecamatan Junrejo. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain: 1) kurangnya pemahaman kepala

sekolah dan guru terhadap isi kebijakan sehingga indikator-indikator pendidikan sebagai ukuran belum terpenuhi. Indikator-indikator tersebut antara lain indikator kelembagaan, kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Dinas Pendidikan kurang melakukan sosialisasi program kepada sekolah-sekolah penyelenggara sehingga sekolah kurang memahami isi kebijakan. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan kepala sekolah dan guru belum dapat menjabarkan isi kebijakan dalam program-program yang disusun oleh sekolah. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan tanpa pedoman yang jelas. Hasil dari pelaksanaan kegiatan juga tidak diawasi dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab; 2) belum ada tambahan guru pendidikan khusus (GPK) dari Dinas Pendidikan sebagaimana kebijakan pada awal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu Dinas Pendidikan akan menyediakan dua GPK pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; 3) kurangnya peningkatan kompetensi guru umum menjadi guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Workshop peningkatan kompetensi diambil dari satu guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan 4) kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan menyebabkan program tidak terlaksana secara optimal sesuai tujuan kebijakan.

Berdasarkan indikator kurikulum dan pembelajaran tidak mengalami hambatan atau dianggap tidak ada hambatan karena kurikulum mengikuti kurikulum yang ada di sekolah penyelenggara dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik inklusi. Selain itu peserta didik tidak banyak sehingga guru umum masih dapat mengatasi keterbatasan dengan dibantu kepala sekolah dan guru lainnya. Demikian juga dengan indikator sarana prasarana dan pembiayaan. Sarana prasarana khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus juga belum tersedia optimal karena masih menggunakan sarana prasarana yang sudah tersedia sama dengan peserta didik normal lainnya. Selama dua tahun berjalan belum ada keluhan tentang sarana prasarana. Hal ini karena sekolah hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus sedang hingga ringan yang masih mampu diatasi oleh sekolah. Sedangkan yang berat seperti buta dan tuli diarahkan ke SLB yang sudah tersedia guru khusus dan sarana yang memadai bagi anak-anak tersebut.

Pembiayaan program inklusif ini dibiayai dari dana BOS dan BOSDA sama dengan peserta didik yang lain karena peserta didik inklusif secara administratif masuk dalam data peserta didik secara keseluruhan dalam sekolah tersebut.

5 Pembahasan

5.1 Kesiapan sekolah bidikan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kecamatan Junrejo

Satuan pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa. Sesuai peraturan Wali Kota Batu Nomor 24 tahun 2013 satuan pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal dan non-formal SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C baik negeri maupun swasta. Untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap satuan pendidikan harus memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kesiapan tersebut antara lain adalah sikap positif dari semua pihak yaitu semua komponen sekolah dan orang tua peserta didik dan adanya kemauan yang kuat dari sekolah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan tanpa diskriminatif.

Setiap kebijakan harus diimplementasikan dengan alat ukur yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan tergantung dari pemangku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan serius sesuai prosedur atau hanya sebuah kebijakan tanpa evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Menurut penelitian Mukhlis (2011), yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intern adalah: 1) kebebasan berinteraksi; 2) kesamaan akses; 3) sosialisasi; 4) manajemen; 5) isi kebijakan. Faktor ekstern adalah sebagai berikut: 1) koordinasi; 2) lingkungan inklusif.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di tiga kecamatan Junrejo Kota Batu diukur berdasarkan indikator prosedur pelaksanaan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Yaitu indikator

Kelembagaan, kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Kelembagaan, yaitu kesiapan secara manajerial. Upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah harus berupaya untuk mendayagunakan sumber daya dan sarana prasarana secara optimal untuk menunjang tujuan pendidikan di sekolah. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus sehingga lulusan memiliki bekal kecakapan hidup (*lifeskill*).

Peran pemerintah dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat besar sebagai koordinator dan evaluator kebijakan. Hal ini senada dengan penelitian dari Hanjarwati (2014), yang menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan terus melakukan pembenahan diri agar program pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi dan penyadaran akan adanya difabel yang berhak mendapatkan pendidikan juga terus diupayakan oleh dinas ke berbagai lini, termasuk masyarakat umum. Perbaikan program juga dilakukan pada aspek infrastruktur yang lebih aksesibilitas bagi para difabel. Kebijakan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta perlu tetap dilanjutkan dengan melakukan perbaikan pada aspek manajemen implementasi agar output dan outcome yang dihasilkan semakin baik, dari segi jumlah dan kualitas.

Indikator kurikulum dan pembelajaran mengacu pada jenis kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian, karena beragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari ringan, sedang sampai berat, maka dalam implementasinya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai standar nasional perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, GPK, dan tenaga ahli yang kompeten seperti Psikolog atau konselor lainnya. Model kurikulum akomodatif yaitu guru melakukan modifikasi pada

strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Ketersediaan sumber daya termasuk dalam indikator ketenagaan. Jumlah guru yang dilibatkan dalam pengelolaan program inklusif adalah semua guru kelas ditambah Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagai tenaga ahli yang bertugas mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasar kebijakan bahwa Dinas Pendidikan bertugas menyiapkan dua GPK untuk dikirim ke sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah juga harus berupaya bekerjasama dengan tenaga ahli bidang Psikologi yang bertugas untuk melakukan tes kecerdasan dan tes tingkah laku terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus. GPK mempunyai tugas yang berbeda dengan guru kelas dan bertugas untuk berbagi pengalaman dan melakukan pembimbingan terhadap guru kelas yang belum melakukan peningkatan kompetensi guru kelas menjadi guru pembimbing peserta didik berkebutuhankhusus.

Kesiswaan merupakan indikator selanjutnya yang menjadi alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Proses identifikasi dan assesmen terhadap peserta didik di sekolah bersangkutan yang dilakukan oleh sekolah sendiri atau tenaga profesional lainnya. Melalui identifikasi sekolah mendapatkan data tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus dapat juga dilakukan melalui penjangkaran terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah di lingkungan terdekat. ABK juga dapat diperoleh dari rujukan dari sekolah luar biasa/institusi lain terdekat baik karena proses mutasi sekolah atau melanjutkan sekolah. Jika tidak ada tenaga profesional maka proses identifikasi dilakukan melalui pengamatan tingkah laku dan hasil belajar siswa. Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud adalah: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, gangguan motorik, menjadi korban kekerasan dan narkoba, tunaganda, dan cerdas istimewa dan/ atau berbakat istimewa. Masing-masing dibagi dalam kategori ringan, sedang dan berat yang diukur dalam kriteria tertentu yang dapat dilakukan oleh profesional dalam bidang psikologi dan anak berkebutuhan khusus.

Indikator sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif satuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya semua sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilitas anak berkebutuhan khusus. Indikator pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat (orang tua peserta didik dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat). Layanan pendidikan inklusif, merupakan layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai penyelenggara pendidikan wajib menerima ABK yang masuk karena jika penyelenggara pendidikan di SD/MI tidak mau melayaninya berarti bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif. Jadi Inti pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus berada di SD/MI harus dilayani seperti anak yang normal atau tidak berkelainan.

Secara umum guru lebih mendukung program inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang telah mampu didik atau dapat mengikuti pembelajaran, sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran diperlukan pendamping untuk mempermudah penanganan. Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian Wirastris (2013) yang menjelaskan bahwa sikap guru terhadap pendidikan inklusif berupa sikap positif yaitu sikap menerima terhadap pendidikan inklusif dan sikap negatif yaitu sikap menolak terhadap pendidikan inklusif. Faktor yang mempengaruhi sikap tersebut adalah latar belakang guru, pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, tipe guru, tingkat kelas, keyakinan guru, pandangan sosio politik, empati guru, dan gender. Kedua, faktor pengalaman yang terdiri dari pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus dan pengalaman kontak dengan anak berkebutuhan khusus. Ketiga, faktor pengetahuan yang terdiri dari latar belakang pendidikan guru, pelatihan, pengetahuan, dan kebutuhan belajar guru. Keempat, faktor lingkungan pendidikan yang terdiri dari dukungan sumber daya, lingkungan orang tua, keluarga, dan sistem sekolah.

Faktor latar belakang guru merupakan faktor yang menunjukkan alasan guru bekerja sebagai guru sekolah inklusif. Alasan ini dapat menjadi dasar seorang guru bersikap positif atau negatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Senada dengan penelitian Prastiyono (2013), menjelaskan bahwa faktor pengetahuan merupakan pemahaman guru terhadap konsep inklusif yang berpengaruh pada keinginan guru untuk menerima pendidikan inklusif di sekolah dan menambah pengetahuan mengenai anak-anak berkebutuhan pendidikan inklusif. Faktor empati merupakan faktor perasaan khusus dan yang dimiliki oleh guru terutama terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sehingga guru menunjukkan sikap memperhatikan dan berusaha menerima keadaan anak berkebutuhan khusus. Sistem sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan inklusi karena guru akan merubah keyakinannya terhadap pendidikan inklusif menjadi sesuai dengan sistem yang berlaku di sekolah.

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2013), Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administratif status kepegawaian ada beberapa alternatif yang memungkinkan. Tugas GPK antara lain: 1) menyusun assessment pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; 2) membangun koordinasi dengan antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik; 3) melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran; 4) memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum; 5) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi;

dan 6) berbagi pengalaman dengan guru kelas dan guru mata pelajaran agar dapat meningkatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Sistem dukungan bagi pelaksana pendidikan inklusif belum berfungsi maksimal, hal ini disebabkan karena komponen sistem kebijakan belum menunjukkan peran yang jelas. Tuntutan pelayanan secara profesional yang cukup harus dimiliki oleh GPK dan guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kemampuan itu didapat melalui jenjang pendidikan khusus bagi GPK dan workshop peningkatan kompetensi bagi guru umum. Dinas Pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap peningkatan kompetensi GPK dan guru umum. Peningkatan kompetensi guru sesuai tugas dan fungsinya dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan seminar-seminar tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sikap peserta didik, oleh karena itu guru pendidikan inklusif harus mempunyai wawasan dan pemahaman yang cukup sehingga guru diharapkan menjadi motor penggerak utama yang akan membangun sikap mental peserta didik dan tidak diskriminatif terhadap mereka. Peningkatan kompetensi guru dapat juga dilakukan melalui tukar pengalaman dengan guru lain, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi/menggali sumber lain kemudian mempraktekkan di dalam kelas.

5.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar

Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan inklusif yang bersangkutan. Tiga sekolah tersebut secara umum sudah siap melaksanakan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah berusaha menyiapkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada. Secara kelembagaan dianggap siap untuk melaksanakan program pendidikan inklusif. indikator-indikator pendidikan yang menjadi ukuran keberhasilan harus terpenuhi. Mulai dari indikator kelembagaan, kurikulum dan pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Namun indikator-indikator ini belum dapat terpenuhi seluruhnya

karena kepala sekolah dan guru belum memahami isi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Sekolah penyelenggara menyiapkan dokumen-dokumen pendukung secara administrasi atau pengelolaan untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain: legalitas program, struktur organisasi kepengurusan program inklusif, program tahunan penyelenggaraan program inklusif dan program jangka menengah. Selain itu juga dokumen program peningkatan kompetensi guru dan program pertemuan internal secara berkala bersama orang tua peserta didik dan stakeholder lainnya. Dokumen-dokumen tersebut hanya sebagian yang dapat terlaksana. Adapun dokumen seperti program jangka menengah, program tahunan dan program pertemuan berkala dengan wali murid belum dilaksanakan. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusif ke sekolah oleh Dinas Pendidikan mengakibatkan sekolah kurang paham apa yang harus disiapkan.

Berdasarkan indikator ketenagaan Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyediakan dua Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan memberikan peningkatan kompetensi terhadap guru-guru umum menjadi guru pendidikan inklusif di sekolah bidikan. Namun kebijakan ini juga belum dilaksanakan sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal. Peningkatan kompetensi guru umum menjadi Guru Pembimbing Khusus sangat penting dilakukan karena guru merupakan ujung tombak keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu sekolah juga tidak memiliki tenaga ahli untuk melakukan identifikasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi ini masih belum dianggap sebagai hambatan yang harus segera diatasi karena peserta didik yang masih sedikit dan identifikasi dilakukan melalui pengamatan tingkah laku dan prestasi belajar. Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, tidak adanya pengawasan berkala dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Demikian juga dengan peningkatan kompetensi guru belum dilakukan secara merata sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif ini menjadi bias tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

6. Simpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar di kecamatan Junrejo Kota Batu belum optimal atau belum tercapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena sekolah belum dapat memenuhi beberapa indikator pendidikan yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif apakah sekolah tersebut berhasil atau tidak dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Indikator-indikator yang dimaksud adalah indikator kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana prasarana dan pembiayaan.

Kurangnya pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mengakibatkan kepala sekolah dan guru kurang mampu menjabarkan isi kebijakan sehingga tidak tersosialisasi maksimal. Sikap guru di sekolah bidikan Dinas Pendidikan cukup positif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif tetapi kesiapannya juga belum optimal karena kurang memahami isi kebijakan. Hal ini mengakibatkan sekolah kurang melakukan sosialisasi secara intern dan pada masyarakat.

Kendala berkaitan dengan ketenagaan adalah belum adanya tambahan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan kurangnya peningkatan kompetensi guru umum menjadi guru pembimbing khusus menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif di tiga sekolah bidikan kurang maksimal. Selain itu kurangnya dukungan, pengawasan, dan evaluasi dari Dinas Pendidikan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan oleh sekolah-sekolah bidikan penyelenggara pendidikan inklusif ini menjadi bias tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

7. RUJUKAN

- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. Edu-Bio; Vol. 4, Tahun 2013.
- Al-Zyoudi. (2006). Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education In Jordanian Schools. *International Journal Of special Education Vol. 21 No. 2*
- Astuti. (2011). *Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Bayu Publishing: Malang
- Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). (2005) Supporting Inclusion, Challenging Exclusion. www.csie.org.uk(diakses 20 Desember 2014)
- Dukmak. (2013). Regular Classroom Teachers' Attitudes Towards Including Students With Disabilities in the Regular Classroom in the United Arab Emirates. *The Journal of Human Resource and Adult Learning, Vol. 9, Num. 1, June 2013*.
- Dunn, W. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dunn, W, (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM.
- Elisa. (2013). Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Vol. 2, No. 01, Februari 2013*
- Fitria, (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusif Di Sekolah Dasar. Ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu. *E-JUPEKhu Volume 1 Nomor 1, Januari 2012*
- Johnsen. (2013). Suitably Education in an Inclusive Educational Setting or A Curricular Approach to Inclusive Education Some Thoughts concerning, Innovation and Research. *Key note lecture, 27. Annual International Conference of Integration and Inclusion Studies University of Leipzig 20-23. February 2013. Berit H. Johnsen, Department of Special Needs Education, University of Oslo*
- Hanjarwati. (2014). Eavaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusif. *Jurnal Inklusi, Vol. 1, No.2 Juli-Desember 2014*
- Lambe & Bones. (2006). Student Teachers' Perceptions About Inclusive Classroom Teaching In Northern Ireland Prior To Teaching Practice Experience. *European Journal Of Spesial Needs Education. Vol. 21 No. 2 May 2006*.

- Mahabbati. (2012). *Pendidikan Inklusif Yang Menyenangkan*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Diseminasi Hasil Pelatihan Luar Negeri Bidang Pendidikan dasar Program Bermutu Dikti, Hotel Grand Dafam MM Yogyakarta, 23-25 Mei 2012
- Marti (2012). Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Padang. *Jurnal ilmiah Pendidikan Khusus*. Vol.1 no.3 September 2012
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Mukhophodhyay. (2013). Voices Of Experience: Botswana Primary Schools Teachers On Inclusive Education. *European Journal of Educational Studies* 5(1), 2013
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi (GP Press Group): Jakarta
- Mukhlis. (2011). Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal administrasi Publik*, Volume 2 No. 1 Tahun 2011
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Gramedia)
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *DIA, Jurnal Administrasi Publik* Juni 2013. Vol.11. 1. Hal. 117 - 128
- Rohman, (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971
- Sari. (2012). Pelaksanaan Inklusif di sekolah dasar Negeri Pakan Sinayan Payakumbuh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*. Vol.1 No. 1 Januari 2012
- Smith. (2013). *Konsep Dan Penerapan pembelajaran Sekolah Inklusif*. Nuansa Cendekia: Bandung
- Stubbs. (2002). *Pendidikan Inklusi Ketka Hanya Ada Sedkit Sumber*. The Atlas Alliance Global Support to Disabled People
- Sukowati, (2013). Implementasi Kebijakan Pelayan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda Dan SPM). Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No. 6, Hal.

1195-1202. Jurusan Adminsitasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, Malang

- Sunaryo. (2009). *Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya Dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa)*. Artikel. Jurusan PLB FIP UPI- Pebruari2009.
- Sulistiyadi. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inlusif di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Manajemen Publik*. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014. ISSN 2303 – 341X
- Tarmansyah. (2009). Pelaksanaan Pendidikan Inklusifdi Sd Negeri 03 AlaiPadang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan Di. Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. IX No.1 April2009*
- The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education Adopted by The World Conference On Special Needs Education: Access and Quality Salamanca, Spain, 7-10 June 1994
- UNESCO. (1990). World Conference On Education For All Meeting Basic Learning Needs: a Vision For The 1990s. Jomtien, Thailand. 5-9 March 1990
- UNESCO. (2007) Education in a Multilingual World. Multilingual Contexts : The Challenge For Education System. International Workshop on Inclusive Education, Andean and Southern Cone Regions” Preparatory Activity of the 48th Session of the International Conference on Education Buenos Aires, Argentina, 12-14 September 2007
- UNESCO.(1990). International Bureau Of Education The Developments In Education: The Education System At the End Of The 20Th Century 1990-2000 National Report Of The Republic Of Zimbabwe
- Winter, E.(2005). Literature Review of the Principles and Practices Relating to Inclusive Education for Children with Special Education Needs. National Council for Special Education (NCSE).
- Wirastari. (2013). Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari Faktor Pembentuk Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan 2V ol. 2, No. 01, Februari 2013*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur

Perwali Kota Batu Nomor 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Modul Pendidikan Inklusif. (2013). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar

